

**Nahdlatul Ulama Tidak Berpolitik: Praktik Politik dan Sebaran
Kader Nahdlatul Ulama di Parlemen Sulawesi Selatan 1984-1998**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Hasanuddin**

Oleh

MUHAMMAD AMIN

F061191005

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Sesuai dengan surat penugasan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Nomor : 875.UN4.9/KEP/2023

Tanggal : 05 Juli 2023

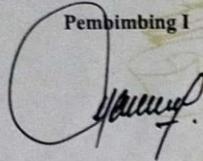
Nama Mahasiswa : MUHAMMAD AMIN

NIM : F061191005

Menyetujui skripsi ini, untuk diteruskan kepada Tim Penguji di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Makassar, 20 November 2023

Pembimbing I



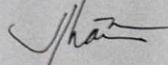
Nasihin, M.A.
NIP. 198204032022043001

Pembimbing II



Drs. Abd. Rasvid Rahman, M.A.
NIP. 196012311991031008

Disetujui untuk diteruskan
kepada Panitia Ujian
Dekan
u.b. Ketua Departemen



Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 19760827 200801 1 011

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023 panitia ujian skripsi menerima dengan baik skripsi mahasiswa atas nama ;

Nama : MUHAMMAD AMIN

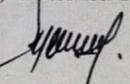
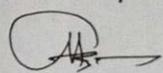
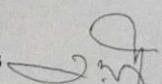
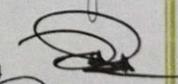
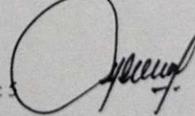
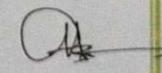
NIM : F061191005

dengan judul:

**NAHDLATUL ULAMA TIDAK BERPOLITIK: PRAKTIK POLITIK
DAN SEBARAN KADER NAHDLATUL ULAMA DI PARLEMEN
SULAWESI SELATAN 1984-1998**

yang telah diajukan dan dipertahankan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra (S.S) Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Makassar, 12 Desember 2023

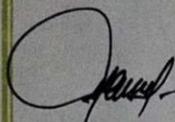
- 
- | | | | |
|----------------------------------|---------------|-----|---|
| 1. Nasihin, M.A. | Ketua | : 1 |  |
| 2. Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A. | Sekretaris | : 2 |  |
| 3. Dr. Nahdia Nur, M.Hum | Penguji I | : 3 |  |
| 4. Andi Lili Evita, S.S. M.Hum. | Penguji II | : 4 |  |
| 5. Nasihin, M.A | Pembimbing I | : 5 |  |
| 6. Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A. | Pembimbing II | : 6 |  |

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : NAHDLATUL ULAMA TIDAK BERPOLITIK: PRAKTIK
POLITIK DAN SEBARAN KADER NAHDLATUL ULAMA
DI PARLEMEN SULAWESI SELATAN 1984-1998
Nama Lengkap : MUHAMMAD AMIN
NIM : F061191005

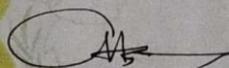
telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal dan dinyatakan sah
memenuhi syarat untuk lulus pada program sarjana di Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin.

Konsultan I



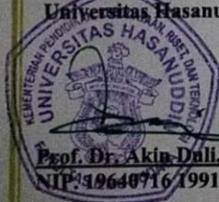
Nasihin, M.A.
NIP. 198204032022043001

Konsultan II



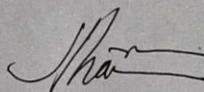
Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A.
NIP. 19601231191031008

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP. 196407161991031010

**Ketua Departemen
Ilmu Sejarah**



Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 197608272008011011

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS DAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : MUHAMMAD AMIN

NIM : F061191005

Departemen : Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Hasanuddin

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

NAHDLATUL ULAMA TIDAK BERPOLITIK: PRAKTIK POLITIK DAN SEBARAN KADER NAHDLATUL ULAMA DI PARLEMEN SULAWESI SELATAN 1984-1998

merupakan skripsi yang telah saya susun sendiri. Skripsi ini salah satu syarat lulus dan memperoleh gelar akademik di Universitas Hasanuddin. Kepenulisan ini sesuai dengan kaidah penulisan akademik, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat di dalamnya unsur plagiasi dan dapat dibuktikan metode historiografinya, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 12 Desember 2023



MUHAMMAD AMIN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim. Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji syukur penulis tiada hentinya kirimkan kepada Allah SWT, atas berkat dan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta atas petunjuk dan pertolongan-Nya, sebagai maha suci dan maha penyayang kepada segenap hambanya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., keluarga, serta para sahabatnya.

Tujuan penulisan skripsi yang berjudul **“Nahdlatul Ulama Tidak Berpolitik:Praktik Politik dan Sebaran Kader Nahdlatul Ulama di Parlemen Sulawesi Selatan 1984-1998”** merupakan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan ini terdapat banyak hambatan dan kendala yang dialami, namun berkat Inayah petunjuk-Nya dari Allah SWT. Semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta bantuan dari berbagai pihak maka hambatan dan kendala tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut andil baik secara langsung maupun tidak langsung, moral maupun material. Ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua, terima kasih atas semua doa, kerja keras, perhatian dan kasih sayang yang diberikan. Terima kasih telah menjadi orang tua yang baik. Kepada Ayahanda **Lappo**, terima kasih atas doa dan dukungan yang

diberikan sejak awal penulis menempuh pendidikan hingga saat ini. Terima kasih tidak lupa penulis ucapkan kepada ibunda **Rosna** yang telah menjadi tempat penulis mengadu banyak hal, doa, dukungan, dan motivasinya untuk mengerjakan skripsi dan kuliah ini.

2. Kak **Sugiana** dan adik **Ahmad Dani** terima kasih atas dukungan yang tidak henti-hentinya diberikan. Tak lupa juga terima kasih diucapkan kepada keluarga dan sepupu, **Aisyah, Juleha, Halima, Satriani** atas dukungan dan segala hal baik yang telah diberikan selama ini.
3. Rektor Universitas Hasanuddin Bapak **Prof. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, beserta para Wakil Rektor dan para jajarannya.
4. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Bapak **Prof. Dr. Akin Duli, M.A**, beserta para Wakil Dekan dan para jajarannya.
5. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Bapak **Dr. Kaharuddin, M.Hum**, terima kasih atas dukungannya dan motivasinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
6. Bapak **Nasihin, M.A**. Selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. **Abd. Rasyid Rahman, M.A**. selaku pembimbing kedua. Terima kasih atas waktu luang, motivasi, membagikan ilmu dan masukannya. Mulai dari bantuan bimbingan proposal, pencarian literatur bacaan dan meluangkan waktu untuk membaca dan mengoreksi tulisan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

7. Bapak **Drs. Dias Pradadimara, M.A.** selaku pembimbing akademik (PA) dan membuka jalan penulis dalam pencarian judul, meluangkan waktu, tenaga, informasi, serta tempat penulis banyak berdiskusi secara menyenangkan, baik mengenai penelitian skripsi maupun hal-hal lain.
8. Dosen-dosen Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, yang telah mengajar dan memberikan ilmu selama masa studi penulis kepada **Dr. Ilham, S.S., M.Hum** selaku Ketua Departemen Ilmu Sejarah, **Dr. Bambang Sulistiyo Edy P, M.S., Dr. Muhammad Bahar Akase Teng, LCP, M.Hum., Dr. Nahdia Nur, M.Hum., A. Lili Evita, S.S., M.Hum., Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum., Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum., Dr. Muslimin A.R. Effendy, M.A., Dr. Abd. Rahman Hamid, Alm. Prof. Dr. A. Abd. Rasyid Asba, M.A.,** mendiang **Margriet Lapia Moka, S.S., M.S.**
9. Bapak **Ujddi Usman Pati, S.Sos,** selaku Kepala Sekretariat Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi.
10. Kak **Alif Nur Situdju, S.S.** selaku asdos Pak Dias, terima kasih telah menjadi orang yang memberikan waktu dan tenaganya memberikan informasi mengenai sumber dan bacaan penulis yang diberikan Pak Dias dalam menyelesaikan skripsi penulis. Terima kasih penulis ucapkan pula kepada **Kak Ichal** atas doa dan dukungannya selama ini.

11. Kak **Kasma**, kak **Hasna**, kak **Sri**, Ibu **Nila**, dan para pegawai di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang banyak membantu penulis dalam pencarian literatur bacaan dan arsip. Terima atas waktu, canda tawanya, dan segala bantuannya yang telah diberikan. Terima kasih penulis ucapkan kepada bapak **Muhiddin** dan para pegawai kantor Arsip Nasional Republik Indonesia.
12. Teman teman penulis, **Amadeus El Shaday**, **Baso Mappangara**, **Candra Wijaya**, **Erwin Saputra**, **Fitrah Nur Akbar**, **Herry Andrii Kiswanto**, **Muhammad Arif Zul Adli**, **Muhammad Arjun Saputra**, **Muhammad Rifqi Taufiqurrahman**, **Muhammad Rijal**, **Muhammad Jamil Haidir**. Terima kasih telah menjadi teman diskusi berbagai hal dan bantuan yang tidak sedikit diberikan dalam penyusunan proposal hingga skripsi serta segala proses, candaan, pengalaman dan kenangan yang tercipta selama menjadi mahasiswa.
13. Teman teman Ilmu Sejarah 2019, **Selvi**, **Mia**, **Rudianto**, **Lola**, **Alga**, **Syarif**, **Risman**, **Sukmayani**, **Adlika**, **Olpida**, **Nurhalisa**, **Tri**, **Sri firda**, **Dea**, **Hana**, **Julia**, **Nirmalasari**, **Suci**, **Baso Fahrizal**, **Faiz**, **Yudi**, **Arkham** dan teman teman lain. Terima kasih atas pengalaman, proses, dan kenangan yang tercipta selama perkuliahan ini.
14. Teman teman SMAN 1 Nunukam Selatan, **Nur Fadilah**, **Marissa**, **Nur Jumiati Aldaf**, **Nila**, **Sukma**, dan **Kadir Rahmat**. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

15. Teman teman Socratic Squad, **Andhy, Retno, Ridwan, Lukita, Syaiema, Ningsih, Syahrul, Faridz, Yusril, Ika, Sabri, Bakri, Alvin**. Terima kasih telah menjadi teman berbagi dan dukungannya selama ini.
16. Teman teman KKN Perhutanan Sosial Bone 108 Posko 7 Cinnong. **Ichsan, Irma, Irfa, Fadil, Fandi, Kisna, Kisma, Ulvi, Sita**. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Terima kasih penulis ucapkan kepada **Adinda Febriani, Marina Kadir**, dan teman-teman KKN Perhutanan Sosial Bone 108.
17. UKM Al Adab FIB Unhas, senior, pengurus. **Saiful, Asraf, Yusuf, Sunre Qadri, Sunre, Kak Arfani, Rafli, Kak Chairul, Kak Riski** dan lain-lainnya. Terima kasih atas proses, kenangannya, doa dan dukungannya selama ini.
18. Narasumber dalam penelitian, khususnya Bapak **Mansur Paleway, Baso Hamzah, Saprillah, Syahril Langko**. Terima kasih atas waktu dan segala bantuan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
19. Ibu **Mia** dan para pegawai di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membantu penulis dalam pencarian arsip anggota DPRD. Terima kasih atas waktu dan segala bantuan yang telah diberikan.
20. Kepada pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang turut serta dalam membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, penulis berharap karya ini dapat menjadi salah satu referensi terkait sejarah politik di Sulawesi Selatan, khususnya Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan.

Makassar, 10 November 2023

MUHAMMAD AMIN

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS DAN BEBAS PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR ISTILAH	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Tinjauan Pustaka	8
1.6.1 Penelitian yang Relevan.....	8
1.6.2 Landasan Konseptual.....	9
1.7 Metode Penelitian.....	12
1.8 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KADER NAHDLATUL ULAMA KEMBALI BERPOLITIK.....	16
2.1. Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan	16
2.2 Nahdlatul Ulama Sebagai Partai Politik	20
2.3 Nahdlatul Ulama Kembali ke <i>Khittah</i> Tahun 1984.....	23
2.4. Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan Setelah <i>Khittah</i> Tahun 1984	28
BAB III Sebaran Kader Nahdlatul Ulama di Parlemen Sulawesi Selatan	37

3.1. Hasil Pemilu 1987, 1992, 1997 di Sulawesi Selatan	37
3.2. Faktor kemerosotan Suara PPP dalam Pemilu di Sulawesi Selatan	85
3.3 Kader Nahdlatul Ulama yang Terpilih pada Tahun 1987-1998	90
BAB IV Kader Nahdlatul Ulama Membangun Basis Massa	98
4.1. Modal Sosial.....	98
4.2. Modal Pendidikan.....	103
4.3. Modal Ekonomi	105
BAB V PENUTUP.....	109
5.1 KESIMPULAN.....	109
DAFTAR PUSTAKA	113
INDEKS	118
LAMPIRAN.....	139
BIODATA PENULIS.....	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Rapat Umum di Lapangan Perintis Kec. Masamba.....	41
Gambar 3.2. Drs Tadjuddin Ibrahim tampil berkampanye di Barru	43
Gambar 3.3. H.M. Syafie Nongke tampil di hadapan massa di Pare-Pare	45
Gambar 3.4. Kampanye PPP di Stadion Mattoanging	48
Gambar 3.5. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Sulsel Drs. Tadjuddin Ibrahim Tampil di hadapan massa PPP	49
Gambar 3.6. Partai Persatuan Pembangunan berkampanye di Pare-Pare	50
Gambar 3.7. Gubernur Sulsel A. Amiruddin dan Walikota H. Jancy Raib	51
Gambar 3.8. Jacob Sammana tampil berkampanye di Lapangan Unhas Baraya...	55
Gambar 3.9. Sekjen (Sekretaris Jenderal) DPP PPP H. Matori A. Djalil	59
Gambar 3.10. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP H. Ismail Hasan Metareum	65
Gambar 3.11. Suasana massa PPP di Lapangan Karebosi	65
Gambar 3.12. Suasana massa PPP di Stadion Mattoanging	67
Gambar 3.13. Kapolda Sulselra Brigjen Pol. Drs. Soedjatmiko dan Kol. Pol. Drs. Said Yunus	69
Gambar 3.14. Massa PPP di Lapangan Perumnas	72
Gambar 3.15. Ketua Umum DPP PPP H. Ismail Hasan Metareum di Lapangan Karebosi	73

Gambar 3.16. Massa PPP yang terjaring razia saat berkampanye	74
Gambar 3.17. Kampanye PPP dengan koalisi PDI Mega-Bintang	75
Gambar 3.18. Model dan Suasana massa PPP saat berkampanye	79
Gambar 3.19. Kampanye Massa PPP di sudut Kota Ujung Pandang	82
Gambar 3.20. Kampanye PPP di Ujung Pandang dan Lapangan Tamangapa.....	84
Gambar 3.21. Ir. Barlianta Harahap berkampanye di Lapangan Karebosi	85
Gambar 3.22. Suasana Pemilu di Kota Ujung Pandang.....	86

DAFTAR ISTILAH

ASWAJA	:Ahlu Sunnah Wal Jamaah
DPRD	:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRD-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
DPC	: Dewan Pengurus Cabang
DPP	: Dewan Pengurus Pusat
DPW	: Dewan Pengurus Wilayah
GOLKAR	:Golongan Karya
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
Hankam	: Pertahanan dan Keamanan
IPNU	:Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
IPPNU	:Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
ICMI	:Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
IKIP	:Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan
IAIN	:Institut Agama Islam Negeri
JURKAM	: Juru Kampanye
KMUP	:Kota Madya Ujung Pandang
LUBER	: Langsung Umum Bebas dan Rahasia

MPW	: Majelis Pertimbangan Wilayah
NU	: Nahdlatul Ulama
NKK	: Normalisasi Kehidupan Kampus
ORDE BARU	: Pemerintahan Soeharto 1968-1998
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PARMUSI	: Partai Muslimin Indonesia
PERTI	: Persatuan Tarbiyah Islamiya
PSII	: Partai Syarikat Islam Indonesia
PMII	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PPS	: Panitia Pengawas Suara
Rezim	: Tata Pemerintah: Pemerintah yang berkuasa
UNHAS	: Universitas Hasanuddin
UMI	: Universitas Muslim Indonesia
USM	: Universitas Satria Makassar

ABSTRAK

Muhammad Amin, Nomor Induk Mahasiswa F061191005, dengan judul “Nahdlatul Ulama Tidak Berpolitik: Praktik Politik dan Sebaran Kader Nahdlatul Ulama di Parlemen Sulawesi Selatan 1984-1998” dibimbing oleh Nasihin, S.S., M.A. dan Drs Abd. Rasyid Rahman, M.A.

Penelitian ini secara umum menjelaskan Nahdlatul Ulama tidak berpolitik dan sebaran kader Nahdlatul Ulama di Parlemen Sulawesi Selatan 1984-1998. Fokus penelitian ini kader NU yang berada pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kader NU kembali berpolitik setelah NU tidak berpolitik sejak *khittah* 1984 dan membangun basis massa di Sulawesi Selatan. Karya ini menggunakan metode sejarah dengan melakukan penelusuran sumber primer berupa arsip-arsip dan data wawancara. Selain itu juga menggunakan sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel.

Hasil penelitian ini menunjukkan keikutsertaan beberapa kader NU dalam kontestasi politik pasca *khittah* 1984, pada dasarnya adalah diluar struktur organisasi NU. Mereka melibatkan diri dalam kontestasi politik didasarkan atas kecenderungan pribadi. Konteks ini didasarkan pada pemahaman tentang makna “NU kembali ke *Khittah*”. Kalangan Nahdliyin di Sulawesi Selatan menganggap bahwa NU kembali ke *khittah* tahun 1984, hanya sebagai himbauan untuk menggunakan hak politik mereka secara jujur dan larangan untuk rangkap jabatan kepengurusan. Sebagai upaya untuk membangun basis suara dalam pemilu, kader NU yang masih berpolitik pasca 1984, tentunya tidak memanfaatkan mesin struktural dari organisasi NU. Mereka membangun basis suara secara semi formal, dimana mereka tidak secara langsung bergerak melalui lembaga NU, tetapi mereka membangun kedekatan secara personal dengan tokoh-tokoh yang kemungkinan mereka menjabat dalam struktural kelembagaan NU serta membangun basis suara dengan beberapa lembaga di luar struktur NU, seperti beberapa pesantren yang berafiliasi dengan NU, IPNU, IPPNU, ANSHOR, FATAYAT dan MUSLIMAT.

Kata Kunci: NU, Kader, khittah, Politik, PPP

ABSTRACT

Muhammad Amin, Student Identification Number F061191005, with the title "Nahdlatul Ulama is Not Political: Political Practices and Distribution of Nahdlatul Ulama Cadres in the South Sulawesi Parliament 1984-1998" supervised by Nasihin, S.S., M.A. and Drs Abd. Rasyid Rahman, M.A.

This research generally explains that Nahdlatul Ulama is not involved in politics and the distribution of Nahdlatul Ulama cadres in the South Sulawesi Parliament 1984-1998. The focus of this research is NU cadres who are in the United Development Party (PPP). This research aims to find out how NU cadres returned to politics after NU had not been involved in politics since the 1984 sermon and built a mass base in South Sulawesi. This work uses historical methods by searching primary sources in the form of archives and interview data. Apart from that, it also uses secondary sources in the form of books, journals and articles.

The results of this research show that the participation of several NU cadres in the political contestation after the 1984 *Khittah* was basically outside the NU organizational structure. They involve themselves in political contestation based on personal tendencies. This context is based on an understanding of the meaning of "NU returns to *Khittah*". Nahdliyin circles in South Sulawesi consider that NU's return to *khittah* in 1984 was only an appeal to exercise their political rights honestly and a prohibition on holding concurrent management positions. In an effort to build a voting base in elections, NU cadres who were still involved in politics after 1984 certainly did not utilize the structural machinery of the NU organization. They build their vote base semi-formally, which they do not directly move through NU institutions, but they build personal closeness with figures who are likely to serve in the NU institutions structure and build a vote base with several institutions in outside the NU structure, such as several Islamic boarding schools affiliated with NU, IPNU, IPPNU, ANSHOR, FATAYAT and MUSLIMAT.

Keywords: NU, Cadre, khittah, Politics, PPP

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nahdlatul Ulama didirikan pada 31 Januari 1926 dibawah pimpinan K.H. Hasyim Asy'ari dengan niat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan, semangat nasionalisme pun terlihat dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri yakni "Kebangkitan Para Ulama". Munculnya NU didasari atas motif agama, mempertahankan paham *Ahlu al-Sunnah wa l-Jama'ah* (Aswaja) dan nasionalisme.¹ Pada awal berdirinya NU lebih mengutamakan dibentuknya persatuan dikalangan umat Islam untuk menghadapi kolonial Belanda. Seiring perkembangannya, perjuangan NU diarahkan pada dua hal yaitu, pertama NU mengarahkan perjuangan pada upaya memperkuat aqidah dan amal ibadah *Aswaja*² disertai dengan persepsi keagamaan terutama dalam masalah sosial, pendidikan, dan ekonomi. Kedua perjuangan NU diarahkan kepada kolonialisme

¹ Amin Farih, "Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol .24(2). (Semarang, 2016. Hlm . 252-254.

² Nurlira Goncing, "Politik Nahdatul Ulama dan Orde Baru", *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol.1 (1). (Universitas Hasanuddin, 2015. Hlm . 67-68.

²*Ahlusunnah Wal jama'ah* adalah mengikuti sunnah Nabi dan sahabat yang berpegangan dasar pada al-Qur'an dan kitab-kitab kumpulan hadis. Lihat di Nurcholish Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*. (Jakarta: Yayasan Perpustakaan Obor Indonesia, 2019). Hlm. 28.

Belanda dengan pola perjuangan yang bersifat kultural untuk mencapai kemerdekaan.²

Seiring kompleksitas dan perkembangan politik Indonesia, perjalanan politik NU mulai menanjak kencang. Mulainya Nahdlatul Ulama bersentuhan dengan politik kenegaraan dimulai pada masa-masa setelah kemerdekaan. Persentuhan ini merupakan pengaruh gerakan nasionalisme dan kontribusi politik kenegaraan NU yang paling jelas. Keterlibatan Nahdlatul Ulama pertama ditandai dengan dukungannya NU terhadap berdirinya Masyumi. Bergabungnya Nahdlatul Ulama dalam Masyumi mengakibatkan, tokoh-tokoh NU terlibat perebutan kekuasaan baik untuk jabatan dalam tubuh partai maupun di luar partai (eksekutif). Konflik yang terjadi dalam tubuh NU di Masyumi, mengakibatkan politik kekuasaan itu diakhiri dengan keluarnya NU. Pada tahun 1952 NU menjadi partai politik dengan nama Partai Nahdlatul Ulama.

Keterlibatan NU dalam politik kekuasaan bukan hanya godaan politik, melainkan adanya faktor pendorong lain NU untuk masuk dalam ranah perpolitikan. Faktor pendorong tersebut, dengan masuknya NU ke dalam Majelis Islami Ala Indonesia (MIAI) pada tahun 1937 bersama Sarekat Islam, Muhammadiyah, Al Irsyad dan beberapa organisasi Islam lainnya³. Mendukung berdirinya Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPPI) pada tahun 1939, hingga NU berkiprah dalam Masyumi sampai NU menjadi partai politik dan berpartisipasi pada pemilu 1955.

³ Nasihin, N. (2014). Islam dan Kebangsaan: Studi tentang Politik Islam masa Pergerakan Nasional di Indonesia. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*. Vol. 2(01), 11-26.

Nahdlatul Ulama dalam pemilu 1955 berhasil membuktikan dirinya sebagai partai politik yang harus di perhitungkan dalam konteks politik nasional.⁴

Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan muncul pada tahun 1938 yang dirintis oleh K.H. Ahmad Bone dengan sebagian ulama tradisional. Organisasi NU di Sulawesi Selatan awalnya bernama “Rabhitatul Ulama”. Organisasi ini bertujuan untuk menggalang persatuan di kalangan ulama *ahlu sunnah wal jamaah*, dengan melakukan kegiatan dakwah dan menyelenggarakan pendidikan tradisional. Organisasi ini pada perkembangannya tidak berjalan baik, meskipun dapat dilihat keadaan umat Islam di Sulawesi Selatan yang mayoritas berpaham *ahlu sunnah wal jamaah*. Sejak berdirinya organisasi ini, kurang mendapat dukungan dari masyarakat Sulawesi Selatan dengan hanya mendapatkan tidak lebih dari 50 orang anggota. Organisasi Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan kemudian menjadi partai politik pada tahun 1953.⁵

Nahdlatul Ulama setelah menjadi partai politik dan berpartisipasi pada pemilu 1955 di Sulawesi Selatan, NU berhasil membuktikan dirinya sebagai partai politik yang layak di perhitungkan dalam konteks politik. Pemilu tersebut, NU menempati posisi kedua setelah Masyumi dalam perolehan suara. Pencapaian itu membuat kepercayaan diri warga NU, namun disisi lain semakin menjadi magnet

⁴ Masmuni Mahatma, “Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara”, *Mawa’izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol.8(1). (Bangka Belitung, 2017). Hlm . 41-43.

⁵ Mustari Bosra, *Tuang Guru, Anrong Guru Dan Daeng Guru: Gerakan Islam Di Sulawesi Selatan 1914-1942*, (Makassar, La Galigo Press, 2008). Hlm. 164-165.

dalam menyeret NU ke dalam pergulatan politik pragmatis dan mengakibatkan kembali ke *khittah* NU awal organisasi sosial keagamaan⁶.

Pada tahun 1973 pemerintahan Orde Baru mengeluarkan keputusan tentang partai politik dengan penyederhanaan sistem kepartaian, dimana seluruh partai – partai Islam difusikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan partai non- Islam difusikan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI)⁷. Fusi partai itu sebenarnya menguntungkan bagi partai-partai Islam yang tadinya terpecah-pecah. Sebaliknya hal itu juga menimbulkan masalah, terjadinya konflik yang terjadi diantara partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam tubuh PPP, NU kecewa dengan dominasi unsur Muslimin Indonesia baik dalam kepemimpinan partai maupun kuota kursi legislatif, karena didalamnya juga berkembang kelompok kepentingan karena faktor ideologi, faktor politis suatu organisasi, serta faktor sosial suatu organisasi.

Sehubungan adanya Tap MPR tahun 1983, setiap partai politik harus berasaskan Pancasila dan tidak boleh ada asas lain mengakibatkan PPP dalam

⁶ Isi *khittah* mengadakan perhoeboengan diantara Oelama-Oelama jang bermazhab terseboet, kedua, memeriksa kitab-kitab sebeloenja dari kitab-kitabnja Ahli Soennah Wal Djama'ah atau kitab-kitabnja Ahli Bid'ah, ketiga, menjiarkan Agama Islam diatas madzhab sebagai terseboet dalam futsal 2 dengan djalan apa saja jang baik, keempat, berichtiar memperbanjak Madrasah-madrasah jang berdasar Islam, kelima, memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masjid, langgar, dan pondok, begitoe djoega dengan hal ahwalnya anak-anak yatim dan orang-orang jang fakir miskin, keenam, mendirikan badan-badan oentoeok memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan, dan peroesahaan, jang tiada dilarang oleh sjara' Agama Islam. Dalam buku Andree Feillard, NU Vis-à-vis Negara.

⁷ Gibson Thomas, *Narasi Islam dan Otoritas di Asia Tenggara*, (Makassar: Innawa, 2012). Hlm.218.

muktamarnya mengganti asas Islam menjadi asas Pancasila, disamping itu juga mengganti lambang PPP yang mulanya lambang Ka'bah diganti menjadi Bintang. Dampak yang diakibatkan asas Pancasila, juga berdampak pada perkembangan golongan atau kelompok Islam yang ada dalam PPP terutama NU, mereka menerima asas tunggal Pancasila. Serangkaian konflik internal yang melanda NU yang cukup serius maka melalui Mukhtar NU tahun 1984 menyatakan diri keluar dalam PPP dan kembali ke *khittah*. *Khittah* artinya NU kembali kefitrahnya semula sebagai *Jami'yah Diniyah* (organisasi sosial keagamaan) yang tidak lagi terikat secara organisatoris dengan Partai Persatuan Pembangunan.⁸

Sejak tahun 1984 NU tidak lagi berpolitik, pertanyaannya adalah apakah seluruh kader NU tidak berpolitik. Pertanyaan ini menjadi penting diajukan karena pada kenyataannya tidak sedikit kader NU yang terjun berpolitik. Meskipun Nahdlatul Ulama telah menyatakan bahwa mereka secara organisasi bukan lagi partai politik.

Sulawesi Selatan sejak tahun 1984 NU tidak berpolitik, dari beberapa pemilu di Sulawesi Selatan yang terjadi setelah NU tidak berpolitik, ternyata ada beberapa orang dari kader NU secara proses pribadi mereka berpolitik dengan terpilih menjadi anggota parlemen di Sulawesi Selatan, itu terlihat dari beberapa anggota parlemen yang terpilih dari partai PPP ternyata termasuk kader – kader NU dan sebagian kader NU terjun berpolitik di dalam partai politik yang telah

⁸ Munawir Ariffin, Sejarah, “Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan di Masa Orde Baru”, *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*. Vol. 5(1), 2019. Hlm. 13-16.

tersedia . Maka dari itu penelitian ini menjadi menarik apakah keterlibatan kader NU secara pribadi berpolitik mereka menggunakan ideologi NU ataupun melalui jaringan Nahdlatul Ulama.

Maka dari itu penelitian ini akan menarik karena pada prosesnya setelah Nahdlatul Ulama tidak lagi menjadi partai politik dan kembali ke *khittah*, apakah betul kader NU itu tidak lagi terjun berpolitik, secara organisasi bukan lagi menjadi partai politik di Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan menjelaskan bahwa di Sulawesi Selatan setelah NU kembali ke *khittah*, masih banyak kader Nahdlatul Ulama yang terjun berpolitik secara individu dengan membawa aspirasi dan ideologi Nahdlatul Ulama baik ke dalam partai Islam maupun partai non Islam.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang dibahas yaitu

1. Mengapa kader NU masih berpolitik?
2. Siapa kader Nahdlatul Ulama yang menjadi anggota parlemen di Sulawesi Selatan pada tahun 1984-1998?
3. Bagaimana kader-kader NU membangun basis massa?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai setelah Nahdlatul Ulama kembali ke *khittah* pada tahun 1984 di Sulawesi Selatan. Kader NU ternyata masih ada yang terjun berpolitik kembali dan terpilih menjadi anggota parlemen pada pemilu di Sulawesi Selatan 1984-1998. Fokus penelitian ini kader NU yang berada pada

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Penulis membatasi penelitian dengan dua batasan yaitu batasan temporal dan batasan spasial. Adanya batasan tersebut bertujuan agar pembahasan dalam penelitian dapat terfokus sehingga apa yang terdapat dalam pertanyaan penelitian dapat terjawab, adapun batasan masalah sebagai berikut:

a. Batasan Temporal

Batasan temporal dalam tulisan ini adalah antara tahun 1984-1998. Batasan ini dipilih oleh penulis pada tahun 1984, menjadi batasan awal penelitian ini karena merujuk pada tahun itu Nahdlatul Ulama tidak lagi menjadi partai politik dan kembali pada *khittah* awal menjadi organisasi sosial keagamaan.

Pada tahun 1998, dipilih oleh penulis sebagai batasan akhir penelitian ini karena merujuk pada akhir dari penerepan fusi partai politik.

b. Batasan Spasial

Batasan spasial merupakan batasan wilayah atau lokasi yang akan dikaji dalam penelitian sejarah atau kajian sejarah. Pada tulisan ini batasan spasialnya adalah wilayah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan merupakan tempat pusat pemerintahan, jaringan informasi dan komunikasi yang menghubungkan segala penjuru daerah yang ada di Sulawesi Selatan.

1.4 Tujuan Penelitian

a. Mengetahui mengapa kader Nahdlatul Ulama masih berpolitik

- b. Mengetahui siapa kader Nahdlatul Ulama yang menjadi anggota di parlemen Sulawesi Selatan
- c. Mengetahui bagaimana kader- kader Nahdlatul Ulama membangun basis massa

1.5. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan gambaran tentang apa yang melatarbelakangi kader Nahdlatul Ulama masih berpolitik setelah *khittah* NU di Sulawesi Selatan
- b. Memberikan gambaran mengenai siapa kader Nahdlatul Ulama yang menjadi anggota di parlemen di Sulawesi Selatan
- c. Memberikan gambaran bagaimana kader-kader Nahdlatul Ulama membangun basis massa

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian yang Relevan

Tuang Guru, Anrong Guru Dan Daeng Guru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942, yang ditulis oleh Mustari Bosra buku ini menjadi penting karena kesimpulan dari buku ini membahas bagaimana organisasi keagamaan muncul di Sulawesi Selatan. Peneliti ingin melihat bagaimana awal mula dan proses berdirinya organisasi NU di Sulawesi Selatan. dan perkembangannya Nahdlatul Ulama setelah berdiri di Sulawesi Selatan. Hal yang membedakan penelitian penulis dengan buku itu adalah peneliti ingin melihat bagaimana Nahdlatul Ulama setelah tidak berpolitik.

Pemilu 1955 Di Sulawesi Selatan dan Proses Menguatnya Kesadaran Nasional Di tingkat Lokal (Suatu Kajian Sejarah Politik Tingkat Lokal), buku yang ditulis Burhaman. Buku ini penting karena kesimpulan buku ini bagaimana Nahdlatul Ulama muncul sebagai partai politik di Sulawesi Selatan dalam Pemilu 1955 NU muncul sebagai partai politik yang memperoleh suara kedua terbanyak dalam pemilu 1955 di Sulawesi Selatan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah peneliti lebih melihat Nahdlatul Ulama dan kader NU pada pemilu – pemilu setelah NU berhenti menjadi partai politik di Sulawesi Selatan. Bagian penting yang mau peneliti lihat dalam buku ini adalah bagaimana perkembangan NU dalam berpolitik di Sulawesi Selatan.

Politik Nahdlatul Ulama dan Orde Baru, yang ditulis oleh Nurlira Goncing. tulisan ini menjadi penting karena kesimpulan tulisan ini melihat proses munculnya Nahdaltul Ulama di Indonesia mulai dari organisasi sosial keagamaan, menjadi partai politik, berfusi partai, konflik yang dialami NU, dan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan. Maka dari itu yang membedakan tulisan ini dengan penelitian peneliti adalah melihat Nahdlatul Ulama dan kadernya ketika terjun berpolitik pada saat NU secara organisasi tidak berpolitik.

1.6.2 Landasan Konseptual

Praktik politik dominan terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan aktor-aktor lokal yang diartikulasikan melalui pemekaran daerah

(Maarif 2012; Sjaif 2014). Praktik politik dimasa desentralisasi menjadikan isu etnisitas, suku, agama, dan golongan sebagai alat legitimasi politik dalam meraih kekuasaan.⁹

Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan yang menyangkut dua ranah yakni dimensi sosio-kultural dan politik. Ditinjau dari awal pembentukannya pada 31 Januari 1926 oleh KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdul Wahab Chasbullah, NU sebenarnya merupakan wadah perjuangan politis para ulama tradisional untuk tetap meneguhkan eksistensi sikap politis mereka dalam beragama ditengah maraknya gerakan pembaharuan keagamaan.¹⁰

Pendekatan sosiologis menunjukkan adanya pengaruh antara nilai-nilai sosiologis yang melekat dalam diri seseorang yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam berpolitik. Instrumen yang menjadi dasar analisis sosiologi adalah agama, suku, pendidikan, tempat tinggal (pedesaan atau perkotaan), pekerjaan, jenis kelamin, dan usia. Perilaku pemilih cenderung menentukan pilihannya dengan mempertimbangkan kinerja dan program kerja yang ditawarkan. Maksudnya menghubungkan kepentingan masyarakat dengan calon yang mereka pilih dan mencapai proses demokrasi yang lebih jujur, adil, dan transparan. Pendekatan

⁹ Saradi Wantona, Rilus. A. Kinseng, dkk. "Praktik Politik Identitas Dalam Dinamika Politik Lokal Masyarakat Gayo", *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol 6, (1), (Departemen Sains dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor: 1 April 2018). Hlm.79.

¹⁰ Nasihin, N., & Dahlan, M. (2022). Transformasi Pembaharuan Islam di Indonesia Abad Ke-20. *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol, 8(2), 211-228. Bandingkan dengan Wasisto Raharjo Jati, "Ulama Dan Pesantren Dalam Dinamika Politik Dan Kultur Nahdlatul Ulama", *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Vol, 13(1), (UGM: 2012). Hlm. 99.

psikologis ini mengakui adanya keterikatan atau dorongan psikologis yang membentuk orientasi politik seseorang.

Kader adalah anggota yang terseleksi, berdasarkan pengujian, penilaian dan pertimbangan tertentu hasil dari pengamatan keaktifan, kesetiaan, keterampilan, kepandaian, moral dan mentalitas, dedikasi dan sebagainya, baik selama mengikuti kegiatan partai maupun kiprah oprasional penugasan di lembaga-lembaga eksternal.¹¹

Karakteristik organisasi NU adalah sebagai organisasi keagamaan dan sosial untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat martabat manusia. Nahdlatul Ulama bertujuan melestarikan berlakunya anjuran Islam yang menganut faham *Ahlusunnah wal Jama'ah* untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta¹². Serta mengembangkan langkah kegiatan serta gerakan ulama yang telah dilakukan dan berlangsung sebelumnya dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan paham keagamaan *ahlusunnah wal jama'ah*.¹³

¹¹ Komaruddin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia). Hlm.138

¹² Ilma Kharismatunisa, “Nahdlatul Ulama Dan Perannya Dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Pendidikan Aswaja An-Nahdliyah Pada Masyarkat Plural”, *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 14, (2), (Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang). Hlm. 148

¹³ Rozikin Daman, *Membidik Nu, Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001). Hlm. 44

1.7 Metode Penelitian

Untuk menghasilkan tulisan yang baik maka dibutuhkan sumber dalam penelitian. Dalam tulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penggunaan metode ini tujuannya adalah untuk mempermudah penulisan karya ilmiah sejarah. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam menjawab permasalahan yang telah ditemukan dalam rumusan dengan melakukan prosedur penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah bagian yaitu pengumpulan sumber (Heuristik), Verifikasi atau kritik sumber, Interpretasi dan Historiografi atau Penulisan Sejarah.

a. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Heuristik merupakan kegiatan mencari atau menghimpun data dan sumber-sumber sejarah untuk bukti sejarah. Dalam pengumpulan sumber digunakan pengumpulan sesuai topik yang ditulis seperti dokumen, arsip, naskah, surat kabar, maupun buku-buku sebagai referensi lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa literatur-literatur sumber sekunder berupa buku-buku dan skripsi dari perpustakaan-perpustakaan diantaranya perpustakaan Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin, sebagai tambahan penulis juga melakukan penelusuran dan akses internet. Selain hal diatas penulis juga mengumpulkan berupa sumber arsip dari Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Arsip Nasional Indonesia. Adapun data arsip yang saya dapatkan di Badan Arsip Nasional adalah

Himpunan SK Gubernur KDH I Sulawesi Selatan 1987 tentang peresmian keanggotaan DPRD Tingkat II hasil Pemilihan Umum No Reg. 984, lampiran penyelenggaraan Pemilihan Umum di Sulawesi Selatan tahun 1987. No Reg. 985, lampiran penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1992 Propinsi Sulawesi Selatan No Reg. 986, dan lampiran penyelenggaran Pemilihan Umum tahun 1997 Propinsi Sulawesi Selatan No. Reg. 987.

b. Kritik Sumber

Pada tahap ini peneliti melihat kembali apakah kritik sumber itu sesuai atau tidak, apakah sumber itu asli atau turunan. Kritik sumber merupakan penerapan dari sejumlah aturan-aturan atau prinsip-prinsip untuk menguji kebenaran atau keaslian dari sumber-sumber sejarah. Kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu, kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern yaitu melihat kembali beberapa sumber, misalnya apakah asli atau tidak, sedangkan kritik intern untuk menguji kebenaran suatu sumber dengan cara meneliti tulisan untuk mengetahui sumber itu asli, turunan, atau palsu.

c. Interpretasi

Setelah melakukan kritik sumber, yang perlu dilakukan selanjutnya interpretasi (penafsiran). Dalam interpretasi ini, teori yang digunakan adalah teori sejarah kualitatif dan teori sejarah kuantitatif. Teori ini diperlukan untuk menghubungkan data-data dari hasil wawancara dan memeriksa kembali keabsahannya agar menjadi penelitian yang objektif. Melalui interpretasi maka akan menghasilkan pandangan yang baru

terhadap sejarah tersebut, atau sudut pandang baru dari penelitian sebelumnya.

d. Historiografi atau Penulisan Sejarah

Penulisan Sejarah merupakan tahap akhir dalam penulisan sejarah. Tahap terakhir yang dilakukan adalah penulisan sejarah setelah seluruh data terkumpul dan diuji keabsahannya, maka selanjutnya yang dilakukan adalah merangkai dan mengungkapkannya dalam sebuah tulisan sejarah. Penelitian ini berfokus mengenai Nahdlatul Ulama tidak berpolitik praktek politik dan persebaran kader Nahdlatul Ulama di Parlemen Sulawesi Selatan, kemudian sumber-sumber tersebut dianalisis dan disajikan dalam bentuk diskriptif dan narasi sejarah.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I, pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas mengenai kader Nahdlatul Ulama kembali berpolitik di Sulawesi Selatan

Bab III, membahas mengenai siapa kader Nahdlatul Ulama yang menjadi anggota parlemen di Sulawesi Selatan pada tahun 1984-1998

Bab IV, membahas mengenai bagaimana kader NU membangun basis massa

Bab V, kesimpulan, pada bab ini merupakan penjabaran dari bab I sampai bab V yang akan ditarik kesimpulan dari seluruh pembahasan. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan sekaligus menjadi penutup dalam penelitian ini.

BAB II

KADER NAHDLATUL ULAMA KEMBALI BERPOLITIK

2.1. Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan

Pendirian NU di Sulawesi Selatan ditandai adanya forum Musyawarah Syafiyah Celebes pada tahun 1938, yang merupakan cikal bakal *tradisi bahtsul masail*¹⁴ NU di Sulawesi Selatan. Ulama-ulama yang kemudian dikenal sebagai pendiri NU di Sulawesi Selatan adalah, K.H. Ahmad Bone dan K.H. Muhammad Ramli merupakan tokoh utama dalam forum ulama tersebut.

Kehadiran forum ulama tersebut memperlihatkan betapa kuatnya basis tradisi ilmiah yang diwadahi dengan semangat berkumpul (*mualaqah*) dan membahas kitab-kitab turats (*appalemba kittaak*) yang dilakukan melalui kemampuan literasi dalam bentuk media modern seperti majalah. Kehadiran utusan NU yang berasal dari Jawa pada *Mulaqoh* Musyawarah Ulama Syafiyah di kampung Wajo pada tahun 1938, hal ini menjadi pertanda bahwa kepengurusan NU sudah ada di daerah pada tahun itu.

Kepengurusan yang dimaksud adalah kepengurusan NU di cabang Makassar, yang salah satu pengurusnya adalah KH. Husain Assagaf dan tercatat juga sebagai pengurus Syuriyah NU Makassar pada tahun 1938. Sebelum adanya pengurus Wilayah, kepengurusan NU di Sulawesi Selatan dan Tenggara sudah

¹⁴ Tradisi ini digunakan selain untuk mengkaji perkembangan pengetahuan, juga untuk mengkaji problem aktual yang terjadi di masyarakat. Eni Zulaiha dkk, "Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad", *M-Musawa Vol* 19 No. 1, (Juli 2020). Hlm. 207.

terbentuk berupa majelis konsul, yang merupakan perwakilan PBNU di daerah berdasarkan amanat Muktamar NU ke-12 di Malang pada 1937.

Nahdlatul Ulama pada awal tahun 1950-an, mengembangkan pola dakwah dan penanaman syariat Islam seperti yang dilakukan ulama-ulama terdahulu. Sehingga Nahdlatul Ulama dapat diterima dan dikembangkan oleh raja-raja dan pemerintah yang berkuasa. Pola dakwah yang dikembangkan melalui strategi kultural dalam struktur budaya lokal yang dapat memperkuat integrasi sosial pada masyarakat lokal dan menjadi penyanggah ketahanan sosial budaya dan sosial dalam masyarakat.¹⁵

Konsul yang membawahi Sulawesi baru dikenal pada awal hingga pertengahan tahun 1950-an. Pada saat itu beberapa cabang sudah ada terbentuk. Cabang-cabang tersebut berada pada daerah Labakkang, Bulukumba, Gorontalo, Tomohon, Makassar, Maros, Parepare, Bone, Polewali Mamasa, Bontain, Palu, Poso, Luwuk, Kotamubagu. Rentang waktu pembentukan NU cabang di Sulawesi hanya berlangsung selama lima tahun (1951-1955), terkecuali Kotamubagu pada tahun 1966. Hal ini menunjukkan pergerakan NU yang begitu masif bukan hanya di daerah-daerah mayoritas penduduk Muslim tetapi juga di daerah basis penduduk Kristen.

Pengurus wilayah Sulsel sendiri baru terbentuk pada tahun 1953 yang diprakarsai oleh, K.H. Gozali yang bertugas di wilayah ini sebagai kepala yang

¹⁵ Zainuddin Taha, *Sejarah Singkat Nahdhatul Ulama Sulawesi Selatan*, (Gowa, Pusaka Almaila, 2021). Hlm. 13-14.

kemudian dikenal sebagai kepala Kantor Wilayah Departemen Agama¹⁶. Sejumlah nama tokoh pendiri NU di Sulawesi Selatan adalah, K.H. Ahmad Bone, K.H. Muhammad Ramli, K.H. Sayyid Jamaluddin Puang Ramma, K.H. Saifuddin, K.H. Husein Saleh Assagaf, H. Gulam, dan Abdul Muin Daeng Myala.¹⁷

Pendiri NU merupakan komposisi dari berbagai latar belakang baik ulama, politisi, saudagar, tokoh adat, dalam hal ini para raja. Sehingga membuat NU dapat berkembang pesat. Pada waktu yang sama beberapa tokoh-tokoh NU juga tercatat sebagai pengurus Konsul NU. Pada tahun 1950-an baik Pengurus Wilayah NU Sulsel dan Konsul NU hadir bersamaan. Kenyataannya hingga pemilu 1955 para ulama yang mengikuti pesta demokrasi pertama tersebut, kemudian duduk di parlemen, dan konstituante masih tercatat sebagai pengurus konsul. Diduga hal tersebut terjadi karena wilayah kerja konsul meliputi Sulawesi, sementara pengurus wilayah NU yang baru terbentuk terbatas khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1956 nama Majelis Konsul Wilayah Sulawesi masih digunakan. Tokoh NU di Sulawesi Selatan yang menjadi anggota Majelis Konsul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Sulawesi yaitu, H.S Djamaluddin Daeng Pemma (1955-1956), Gulam (1955-1956), dan Abdul Muin Daeng Myala. Sedangkan K.H.M Ramli menduduki jabatan sebagai anggota pengurus besar partai

¹⁶ Abd. Kadir Ahmad, “Awal Keberadaan NU Sulsel: Tradisi *Appalemba Kittak* dan Profil Pengurus Majelis Konsul NU Sulawesi”, *Mimikri: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vol.9. (1). (Makassar, 2023). Hlm. 19-30.

¹⁷ Abd. Kadir Ahmad, “Peran Keagamaan Ulama di Makassar dan Gowa Awal dan Akhir Abad Ke-20: Keberlangsungan dan Perubahan”, *Educandum*, Vol. 5. (1). Hlm. 69-70.

NU, bagian Syuriyah pada 31 januari 1954). Perkembangan NU di Sulawesi Selatan berbeda dengan NU di Jawa, dimana NU di Jawa muncul sebagai *Jami' yah* yang bergerak di semua bidang seperti urusan sosial, keagamaan hingga politik, sedangkan NU di Sulawesi Selatan muncul dan berkembang sebagai partai politik. Para tokoh ulama terkemuka di Sulawesi Selatan pada saat itu tidak hanya mempresentasikan NU sebagai jamaah, tetapi juga mereka bagian dari pengurus NU yang tergabung dalam Majelis Konsul sebagai *jami' yah*. Hal ini wajar karena pada saat itu NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952.¹⁸

Pada tahun 1953 K.H. Wahid Hasjim (Menteri Agama) pada waktu itu bersama K.H. Gazali kepala Kantor Agama Sulawesi Selatan dibantu dengan K.H. Sayed Djamaluddin Assagaf, K.H. Muh Ramli, K.H. Saifuddin, K.H. Djamaluddin Puang Ramma dan K.H. Ahmad Bone serta beberapa ulama di Sulawesi Selatan membentuk Partai Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan. Terbentuknya Partai Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan dibarengi dengan cepatnya terlaksana pembentukan cabang-cabang NU di daerah. Hal ini dapat terlaksana dengan pendekatan kultural tersebut, NU dikenal sebagai organisasi yang fleksibel, dinamis, dengan menggunakan dan menjadikan kemaslahatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan serta kebijakan organisasi, baik dalam bidang agama, sosial, budaya, dan politik.

¹⁸ Abd. Kadir Ahmad, *Op.Cit.* Hlm. 31-12.

2.2 Nahdlatul Ulama Sebagai Partai Politik

Pada tahun 1952 NU menarik diri dari Masyumi dan berubah menjadi partai politik. Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap (1955) pemilu dilaksanakan dan merupakan pemilihan pertama yang dilaksanakan di Indonesia. Hasil pemilu tersebut perhatian tertuju pada urutan ketiga yang ditempati oleh NU, yang merupakan sebuah partai politik yang tergolong baru. Dukungan massa partai yang hebat dan basis massa yang kuat, NU akhirnya berhasil menduduki urutan ketiga pada pemilu 1955 tersebut.¹⁹ Perubahan politik NU pada tahun 1952 yang mengubah gerakannya menjadi partai politik juga berdampak pada NU di Sulawesi Selatan, yang berubah menjadi partai politik pada tahun 1953 dan menjadi kontestan dalam pemilu 1955.²⁰

Melihat hasil pemilu 1955 menghadirkan begitu banyak kejutan salah satunya di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Nahdlatul Ulama berada di urutan kedua dalam perolehan suara daerah pemilihan Sulawesi Selatan dan Tenggara, pemilu tersebut merupakan pemilu pertama kali yang diikuti oleh NU semenjak menjadi partai politik khususnya di Sulawesi Selatan.²¹ Selama NU menjadi partai politik kegiatan ma'arif, mubarak, dan dakwah diniyah terbatas dilakukan, dimana

¹⁹ Handri Raharjo, *Metamorfosis Sarekat Islam Gerakan Politik Islam dan Munculnya Kesadaran Nasional*, (Yogyakarta, Media Pressindo, 2019). Hlm. 178-179.

²⁰ Wawancara Saprillah, 2 Agustus 2023

²¹ Burhaman, *Pemilu 1955 di Sulawesi Selatan dan Proses Menguatnya Kesadaran Nasional di Tingkat Lokal (Suatu Kajian Sejarah Politik Tingkat Lokal*, (Makassar, Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Hlm. 214.

para tokohnya lebih bergiat dalam politik praktis.²² Para ulama, kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) lainnya terjun dalam kegiatan praktis politik dengan menjadi anggota DPR, DPRD, dan badan pemerintahan lainnya. Sejak Nahdlatul Ulama menjadi partai politik di Sulawesi Selatan, NU melakukan penguatan kader di Sulawesi Selatan melalui ulama yang selama ini memang telah terafiliasi dalam organisasi NU.²³

Pertemuan antara kebutuhan secara nasional serta kepentingan lokal untuk mendapatkan perlindungan dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat tradisional, membuat NU di Sulawesi Selatan saat itu mengubah kegiatannya dari organisasi sosial keagamaan menuju organisasi partai politik sehingga melupakan gerakan dakwah yang menjadi *khittah* awal pendiriannya. Basis-basis massa NU yang merupakan kelompok yang wujudnya dari kelompok-kelompok pengajian tarikh dan semacamnya, diarahkan untuk mendukung NU sebagai partai politik semata dan tidak diarahkan pada penguatan dan peningkatan kualitas maupun kapasitas masyarakat.²⁴

Tarikan politik dalam tubuh NU di Sulawesi Selatan terus berlangsung hingga NU, memfusikan dirinya dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada era 1970-an. Banyak elite politik dan pengurus NU yang terlibat dalam partai, membuat kepentingan partai lebih banyak mewarnai khasanah dalam kegiatan

²² Zainuddin Taha, *Op.Cit.* Hlm. 3

²³ Saprillah, *Pengabdian Tanpa Batas Biografi Anregurutta Haji Abdul Malik Muhammad*, (Solo, Zadahaniwa, 2014). Hlm. 88.

²⁴ Arifuddin Ismail dkk, *NU di Segala Lini*, (Makassar, Idelenggara, 2009). Hlm. 46.

maupun dalam tubuh NU dan berbanding terbalik dengan kepentingan NU tidak menjadi bahan pertimbangan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Maka di sinilah era dimana NU tidak kemana-mana, tapi ada dimana-mana.

Konsekuensi adagium dari politik ini menjadikan NU ditinggalkan oleh elite politiknya dan menelantarkan warganya. Perkembangan aktifitas NU menjadi konstan dimana NU kecewa terhadap hasil pemilu 1971. Nahdlatul Ulama (NU) merasa bahwa ada intimidasi dengan, terlibatnya militer dari pemerintah Orde Baru untuk memanipulasi hasil pemilu. Ditengah kekecewaan terhadap hasil pemilu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Idham Chalid diangkat sebagai Ketua DPR/MPR. Diangkatnya Idham Chalid sebagai Ketua DPR/MPR menjadikan perpecahan dalam tubuh NU semakin meluas antara, kubu pro Idham yang “tradisional Konservatif” yang dianggap sangat loyal pada pemerintah dan kubu “ tradisional kritis” (Radikal) yang dimotori oleh Subhan Ze.²⁵

Pertengkarannya kedua kelompok ini semakin besar setelah lepasnya jabatan Menteri Agama yang selama ini menjadi jatah NU. Dampak persetujuan tersebut juga merambat sampai ke daerah salah satunya Sulawesi Selatan dan berakibatnya tersingkirnya NU dari PPP, karena dianggap tidak solid. Disinilah era dimana kekecewaan itu sampai pada dua pemilu berikutnya.²⁶

²⁵ Subchan ZE adalah tokoh muda NU yang bergabung ke NU pada tahun 1950-an, Subchan merupakan ketua Tanfidziyah pada tahun 1968 dan pada tahun 1971. Lihat di Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*. (Yogyakarta: LKIS, 1994). Hlm. 276.

²⁶ *Ibid.* Hlm. 47.

Pada tahun 1973 adanya keputusan pemerintah Orde Baru tentang partai politik, NU memfusikan gerakan politiknya bersama dengan Parmusi, PSII, dan Perti dalam satu partai yang diberi nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui deklarasi pada tanggal 5 Januari 1973. Pada tahun 1977 untuk pertama kalinya partai ini mengikuti pemilihan umum tahun 1977 dan hingga pemilu 1982 merupakan pemilu terakhir yang diikuti oleh NU sebelum berhenti menjadi partai politik dan berubah menjadi organisasi keagamaan.²⁷

2.3 Nahdlatul Ulama Kembali ke *Khittah* Tahun 1984

Pada tahun 1983 pemerintah memutuskan bahwa seluruh organisasi-organisasi harus menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas Ideologi. Organisasi Islam yang menerima asas Pancasila adalah NU, dimana organisasi Islam ini masih berada dalam PPP, sehingga membuat banyak tokoh-tokoh senior NU merasa kurang percaya terhadap aktifitas partai politik dan terlibatnya NU dalam PPP akan memberikan manfaat bagi NU dan konstitusinya. Pada Desember 1983 suatu rapat nasional yang dihadiri para ulama-ulama senior NU memutuskan bahwa NU harus menarik diri dari PPP, meninggalkan total partai politik dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal.

Banyak anggapan kyai senior bahwa NU sebagai organisasi bukan sebagai organisasi politikus yang ada di Jakarta yang dipimpin oleh Idham Chalid, namun hal ini dianggap merugikan bagi kelompok politik sayap kiri di Jakarta. Langkah ini mengakibatkan perpecahan dalam tubuh NU, dimana pemimpin pesantren dan

²⁷ Judhariksawan, M. *Ismail Napu Pemimpin Markas Laskar Hizbullah dan Sabilillah Peristiwa Bandung Lautan Api*, (Jakarta, 2015). Hlm. 102-103.

reformis muda kini ditantang oleh pendukung Idham Chalid di Jakarta. Dampaknya banyak pemimpin tarekat dan kyai Madura yang mempunyai pengaruh penting dalam NU juga menentang pemisahan diri NU dari PPP.²⁸

Pada bulan Desember 1984 Nahdlatul Ulama (NU) mengakhiri peranmya sebagai partai politik dan memutuskan kembali ke *khittah* yaitu kembali sebagai organisasi keagamaan, pendidikan, kultural, sosial, dan ekonomi. Tokoh utama dalam transformasi ini adalah Abdurrahman Wahid dan Kiai Achmad Siddiq adalah seorang pemimpin senior yang tersohor karena sikap antikomunismenya dan juga orang lama yang menjabat sebagai kordinator dewan penasihat keagamaan NU yaitu Syuriah. Setelah NU memperlihatkan dirinya bukan lagi oposisi politik, kaum muda reformis mulai melakukan langkah rekonsiliasi dengan pemerintah. Sejak itu, NU akan memanfaatkan status nonpolitiknya sebisa mungkin menjalin hubungan kooperatif dengan pemerintah.

Pada kampanye Pemilu 1987 merupakan ujian pertama terhadap NU setelah keluar dalam kegiatan politik. Kerjasama antara kiai dan birokrasi mulai membuahkan hasil dimana, para kiai mendorong pengikut mereka mendukung Golkar, sehingga birokrat melihat tidak adanya hambatan politik untuk menjalin kerjasama dengan NU atas nama pembangunan. Hasil pemilu 1987 menghasilkan peralihan pendukung NU dari PPP ke Golkar, perolehan suara Golkar menanjak naik dari hasil pemilu pada tahun 1982. Sedangkan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami penurunan dari hasil pemilu sebelumnya. Hasil

²⁸ Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta), 2008. Hlm. 644-646.

pemilu itu mengakibatkan kepercayaan diri rezim semakin meningkat, karena menunjukkan bahwa kelompok Islam dapat dikendalikan khususnya NU sudah bisa dikendalikan dan berdampak pada melemahnya PPP. Pada tahun 1990-an situasi politik menunjukkan masih terkendali dimana, PPP dan PDI mengalami konflik kepemimpinan yang dipelopori oleh pemerintah. Kondisi Indonesia yang semakin religius, terdapat tokoh terkemuka dari NU secara diam-diam mendukung Soeharto menjadi presiden, satu dukungan yang menjadi rahasia umum.²⁹

Pemilu tahun 1992 kemenangan kembali diraih oleh Golkar, namun suara yang diraih Golkar dalam pemilu ini mengalami penurunan dari hasil pemilu 1987. Sementara PPP hanya meraih suara yang tidak begitu besar dari pemilu sebelumnya. Seiring berjalannya waktu Soeharto, Habibie dan aparat menganggap bahwa Abdurrahman Wahid sebagai ancaman potensial, sehingga pada tahun 1994 pemerintah dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melakukan satu usaha untuk menggoyahkan kepemimpinan NU, dengan adanya dewan NU tandingan.

Abdurrahman Wahid mampu melewati rintangan tersebut. Sepanjang tahun 1996 kekuatan-kekuatan yang menentang rezim sudah bisa dikenali, Abdurrahman Wahid merupakan tokoh oposisi Islam yang memiliki pengaruh besar dan PDI dibawah Megawati juga mengalami perkembangan pesat sebagai partai politik yang mempunyai dukungan luas masyarakat baik dalam kelompok intelektual, kelas menengah perkotaan, dan pedesaan, serta kaum miskin kota Jakarta.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 647-66.

Pemilu 1997 Abdurrahman Wahid melakukan kampanye keliling dengan ibu Tutut yang merupakan anak dari Soeharto dan merupakan ketua Golkar pada saat itu. Abdurrahman Wahid juga berperan memindahkan suara NU ke Golkar. Hasil pemilu tersebut dimenangkan lagi oleh Golkar dan PDI mengalami kekalahan dalam pemilu itu, dan mengakibatkan perolehan suara mereka turun dari hasil pemilu sebelumnya. Banyak suara dari PDI berpindah dan tersebar merata pada perolehan suara bagi PPP dan juga Golkar. Presentase jumlah suara ini merupakan jumlah suara tertinggi yang di dapatkan Golkar dari pemilu sebelum-sebelumnya.³⁰

Pada saat yang sama Nahdlatul Ulama (NU) memasuki periode kritis, dimana NU mempunyai lawan baru yang mempunyai kekuatan yang sangat sulit ditandingi dari pada Golkar, karena lawan tersebut berada dalam partai PPP sendiri yaitu Muslimin Indonesia (PARMUSI). Konflik yang muncul diantara kedua kubu ini adalah akibat penyusunan daftar caleg yang mengakibatkan pertengkaran antara kelompok-kelompok Islam, dimana mereka masing-masing ingin mempunyai sebanyak mungkin calon jadi atau calon pasti yang akan terpilih karena berada di urutan atas dalam daftar caleg.

Para aktivis menyesali kelalaian NU dalam kegiatan sosial-pendidikan karena terlalu bergelut dalam masalah politik praktis. Persaingan yang semakin meruncing dalam tubuh partai membuat NU menjadi semakin radikal. Keseimbangan yang rawan tahun 1980 menjadi kacau dengan semakin tersingkirnya golongan tradisionalis dalam tubuh PPP. Pilihan untuk

³⁰ *Ibid.* Hlm. 674-687.

mengundurkan diri dari partai tampaknya menjadi keputusan hampir semua aktivis meskipun dengan alasan yang sering sangat berbeda satu sama lain.³¹

Keputusan yang diambil dalam musyawarah Situbondo tahun 1984 masih kurang jelas, dimana hanya mengimbau semua simpatisan untuk menggunakan hak-hak politik mereka secara jujur, serius dan bertanggung jawab. Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapatkan rekomendasi untuk mengeluarkan peraturan yang melarang semua jabatan rangkap pengurusnya. Mereka diharuskan untuk memilih antara karier politik atau sosial keagamaan. Kiai Achmad dan Abdurrahman Wahid memiliki pandangan yang berbeda mengenai *khittah*, dan juga para rekan mereka yang ada di Syuriyah dan terutama di Tanfidziyah.

Pengurus baru adalah percampuran antara para cendekiawan dan politikus yang dekat dengan Kiai As'ad. Kiai ini terus memainkan pengaruhnya, sedangkan kelompok progresif sibuk melakukan reorganisasi yang cukup besar dalam struktur NU. Menurut Abdurrahman Wahid Nahdlatul Ulama (NU) sebaiknya berusaha untuk masuk dalam segala lini, lingkungan, dan tempat di semua partai NU harus ada baik di Angkatan bersenjata, PDI, maupun Golkar.

Kiai As'ad sendiri melakukan segalanya untuk menyingkirkan, John Naro yang merupakan pimpinan PPP pada saat itu. Kampanye pemilu tahun 1987 membuat perbedaan-perbedaan ini muncul ke permukaan. Pada tanggal 11 Januari 1985 PBNU mengeluarkan keputusan larangan, jabatan rangkap di bidang politik

³¹ Feillard Andree, *NU Vis-à-vis Negara*, (Yogyakarta, Basabasi, 2017). Hlm. 180-189.

dan sosial. Keputusan ini memberikan waktu satu tahun terhadap para pengurus daerah untuk, menentukan pilihan mereka antara karier politik atau sosial dan dua tahun bagi para pengurus tingkat kabupaten. Sehingga beberapa aktivis mulai tertarik dengan pendekatan yang dilakukan oleh Golkar.³²

2.4. Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan Setelah *Khittah* Tahun 1984

Melihat dari sejarah masuknya Nahdlatul Ulama (NU) di Sulawesi Selatan, maka tidak heran jika warna NU di Sulawesi Selatan dipengaruhi dengan politik, hal itu terlihat saat NU sebagai partai politik atau organisasi yang aktif terlibat dalam perpolitikan. Hal ini diketahui pada saat NU masuk di Sulawesi Selatan, disaat sedang melakukan konsolidasi untuk menjadi partai politik sendiri dengan lepas dari Masyumi.³³

Kecenderungan akan politik terhadap NU di Sulawesi Selatan tampaknya tidak hilang ketika, NU menyatakan diri kembali ke *khittah* dalam Mukhtamar ke 27 tahun 1984. Para Nahdliyin di Sulawesi Selatan mematuhi bahwa NU tidak lagi menjadi partai politik, tetapi nyatanya kader NU tetap berpolitik dan mewarnai politik lokal dan tidak menghilang dari nalar kaum sarungan di Sulawesi Selatan. Setelah Nahdlatul Ulama (NU) dinyatakan tidak lagi menjadi bagian dari partai politik khususnya PPP di Sulawesi Selatan. Maka ada beberapa tokoh NU yang memilih bergabung dengan partai Golkar, salah satunya *Gurutta* Arifuddin

³² *Ibid.* Hlm. 238-240.

³³ Syamsurijal, "Mengintip Nahdlatul Ulama (NU) dari Timur: Khittah NU dalam pandangan dan Pengalaman Nahdliyin di Sulawesi Selatan", Mimikri: *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vol. 9(1). (Makassar, 2017). Hlm. 40-42.

Cawaidu yang pernah menjabat sebagai ketua Tanfiziah NU dan berhasil menjadi anggota legislatif beberapa periode.

Berdasarkan penjelasan tokoh NU di Sulawesi Selatan, terlibatnya NU dalam berpolitik dianggap penting. Sikap menghindari, bersebrangan dengan pemerintah merupakan bagian dari sikap politik akomodatif dari NU yang ditempuh dengan terlibat dalam partai politik milik pemerintah. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa beberapa tokoh NU di Sulawesi Selatan, memilih bergabung dengan Golkar dimasa Orde Baru. AGH Sanusi Baco mengatakan dalam beberapa pidatonya, menyebutkan bahwa pembangunan beberapa aset-aset NU, tidak terlepas dari adanya keterlibatan pemerintah. Keterlibatan orang-orang NU dalam partai politik maupun jabatan pemerintahan, dapat memudahkan proses berjalannya agenda-agenda NU dalam berbagai bidang misalnya, dalam hal pendidikan, khususnya pesantren, pemberdayaan petani, dan lain-lainnya.

Menurut AGH Sanusi, orang-orang NU yang menjadi pejabat atau bergerak dalam partai politik dapat *membenargunakan* (istilah kebalikan dari menyalahgunakan) posisi dan jabatannya³⁴.

Pandangan beberapa tokoh NU di Sulawesi Selatan sejak awal pendirian NU, meskipun dalam statutenya dikatakan sebagai organisasi keagamaan dan sosial saja, tetapi juga memiliki dimensi politik. Politik disini tentu saja tidak dimaknai secara sempit, namun hanya untuk merebut kekuasaan. Menurut Ahmad Baso kepentingan politik NU, pada awal berdirinya adalah bagaimana membebaskan

³⁴ *Ibid.* Hlm.48.

Indonesia dari penjajahan, tetapi sengaja disamarkan agar pemerintah kolonial mengizinkan NU berdiri. Sedangkan Raharjo Jati, melihat dimensi utama politik ulama dalam mendirikan NU adalah sebagai wadah perjuangan untuk mengembangkan paham keagamaan ulama tradisional ditengah maraknya paham keagamaan tradisional.

Menurut para tokoh NU di Sulawesi Selatan dengan kembali ke *khittah*, tidak berarti NU tidak bisa lagi berpolitik, hanya saja bisa disadari bahwa NU tidak bisa lagi secara langsung terlibat dalam partai politik, meskipun tetap aktif memberi warna terhadap perpolitikan tanah air dan khususnya juga di Sulawesi Selatan. Ulama-ulama Nahdlatul Ulama (NU) sejatinya dianggap mempunyai pandangan politik yang sangat luas dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Prinsip tentang *tasarruful imam ala arraiyah manuntun bil maslaha* (tindakan pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan) menjadi landasan politik para ulama itu dapat dipahami secara dalam dan para ulama memiliki strategi untuk mewujudkannya.

Sulawesi Selatan telah dibuktikan oleh ulama-ulama pendiri NU, misalnya KH M. Ramli yang terlibat dalam konstituante. Beliau merupakan ulama politisi yang diperhitungkan karena gagasan politiknya. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan pandangan miring para Indosianis yang cenderung mencemooh keterlibatan NU dalam politik elektoral. NU dianggap tidak tahu berpolitik, bodoh, jumud, oportunistis, dan bahkan koruptif.³⁵

³⁵ *Ibid.* Hlm.49.

Greg Fealy merupakan salah satu orang yang mengkritik tajam NU yang berpolitik dalam tulisannya, dia mengakui secara objektif bahwa pemimpin NU yang terjun berpolitik bukanlah orang yang tidak berpengalaman dan tidak bisa dengan mudah dipermainkan. Mereka adalah orang-orang yang pandai dan memiliki visi politik yang jelas. Hal yang meragukan NU adalah orang yang tidak senang NU berpolitik, seperti yang diungkapkan oleh KH Wahab Hasbullah yang mengeluarkan propaganda kepada orang NU agar tidak percaya pada kekuatan NU-nya sendiri. Padahal ibarat senjata NU adalah Meriam yang sesungguhnya, bukan batang kelapa atau meriam tiruan.

Menurut Fealy politik NU sering dianggap oportunistis, yang hanya mencari aman dengan kekuasaan agar bisa mendapatkan penghasilan dan kursi jabatan, sesungguhnya hanya tidak memahami akar politik NU yang berbasis akar politik *sunni*. Politik *sunni* ini mengedepankan keluwesan, akomodatif dibanding konfrontatif, tetapi semua itu diarahkan pada kepentingan kemaslahatan umat. Bukan untuk kepentingan orang perorang atau hanya untuk meraih jabatan tertentu, karena itu kaidah-kaidah fiqih yang sangat kental dalam tubuh NU, sering juga digunakan dalam berpolitik, seperti *akhaffud dararain* (memilih resiko yang lebih kecil), *darul mafasid muqaddamu ala jalbi masalih* (menghindari bahaya diutamakan dari pada melaksanakan kebaikan), dan *ma'la yudraku kulluhu, la yutraku ba'duhu* (apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan sebagian yang bisa diraih).³⁶

³⁶ *Ibid.* Hlm. 50.

Faktor pendorong lain kembalinya NU ke *khittah*, dalam arti tidak lagi berpolitik dalam partai politik. Karena sebagian ulama, seperti Kiai Ahmad Siddiq menyadari bahwa banyak hal penting dalam bidang pendidikan, sosial, dan kebudayaan yang terabaikan. Bukan karena pada dasarnya NU tabu dalam berpolitik, tetapi karena keterlibatan NU dalam berpolitik pada rentang tahun 60-80-an, mengakibatkan terabaikannya urusan sosial keagamaan.

Menurut Hairus Salim NU pada saat aktif berpolitik di partai, kantor NU tidak pernah didatangi pengurus, terbengkalai, karena rata-rata sibuk di kantor PPP. Menariknya kenyataan seperti itu tidak sepenuhnya terjadi Sulawesi Selatan. Diakui AGH Sanusi Baco, NU saat berpartai cukup tergagap-gagap. Tetapi dalam bidang lainnya tetap berjalan sangat baik, dengan gerakan Seni-budaya melalui Lesbumi aktif, dakwah melalui ulama-ulama di berbagai tempat berjalan lancar termasuk melalui corong radio al-Qawakib.³⁷

Menurut *Anregurutta*³⁸ H. Sanusi Baco dengan adanya orang yang terkhusus menjalankan politik melalui partai dan yang lain mengurus NU, sebagai *Jami'yah Diniyah Ijtimaiyah*, keduanya tidak boleh dicampur adukkan. Orang yang mengurus NU juga mengurus partai politik. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, tetap perlu berpolitik, baik dalam arti politik kebangsaan maupun terlibat langsung secara praktis di tingkat legislatif

³⁷ *Ibid.* Hlm. 50-51.

³⁸ *Anregurutta* dalam struktur ulama Bugis dipandang sebagai ulama karismatik. Ia dikaitkan dengan pemilikan *karamaq* (karomah) dan *barakkaq* (berkah) yang identik dengan sifat adikodrati menurut kategori Max Weber. Dilihat pada Abd. Kadir Ahmad, "*Ulama Bugis*" (Makassar:Idobis, 2008). Hlm 419.

maupun eksekutif. Nahdlatul Ulama adalah representasi dari mayoritas umat Islam Indonesia, dan mayoritas umat Islam Indonesia adalah kalangan bawah yang termarginalkan. Mereka adalah petani, buruh, nelayan, dan pedagang kecil. NU-lah sebenarnya yang paling mengetahui lika-liku kehidupan mereka dan karena itu NU harus memperjuangkan kemaslahatan umat.

Khittah Nahdlatul Ulama dalam pandangan para Nahdliyin Sulawesi Selatan, pada dasarnya sama dengan Nahdliyin lainnya di Jawa. Namun, tampaknya garis perjuangan ini tidak sepenuhnya di pahami oleh seluruh Nahdliyin atau merasa dirinya Nahdliyin. Sehingga beberapa pandangan dan praktik keagamaan dan kebangsaan yang berasal dari luar NU, mempengaruhi pandangan dan sikap para nahdliyin Sulawesi Selatan. Hal ini diakibatkan karena, beberapa kalangan yang menjadi anggota NU tanpa melalui proses pengaderan. Mereka masuk atau dimasukkan karena menginginkan jabatan dan posisinya.

Sebaliknya ada yang masuk ke NU karena membutuhkan jabatan. Hal ini sepertinya telah disadari oleh pengurus NU dengan membangun proses pengaderan yang massif, diluar yang sudah dilakukan oleh organisasi otonom NU. Pemaknaan NU kembali ke *khittah*, yang tidak terlibat dalam partai politik dalam kalangan Nahdliyin Sulawesi Selatan menganggap hal tersebut tidak bisa dipahami atau dibaca bahwa NU Apolitik. Nahdlatul Ulama (NU) tetap harus terlibat politik, hanya saja pengurus NU tidak boleh lagi mengelola partai. Visi dan misi politik tidak ada salahnya dibangun di NU, untuk kemudian direkomendasikan kepada partai politik yang dianggap bisa memperjuangkan visi dan misi tersebut.

Kecenderungan NU Sulawesi Selatan adalah memandatkan rekomendasi tersebut pada PKB, meski tidak menutup kemungkinan juga pada partai politik lainnya. Kecenderungan NU di Sulawesi Selatan untuk tetap terlibat dalam politik, tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya NU di Sulawesi Selatan. Nahdlatul Ulama (NU) masuk di Sulawesi Selatan pada saat menjadi partai politik. Ulama pendirinya juga menjadi seorang politisi, tetapi mereka politisi yang memiliki visi politik yang jelas. Strategi politik yang adaptif, luwes, dan lebih cenderung kompromistis digunakan untuk meraih tujuan-tujuan politik kebangsaan NU. Tujuan politik kebangsaan itu berujung pada *masalah al-ummah* (kemaslahatan umat), ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial.³⁹

Setelah Nahdlatul Ulama (NU) kembali ke *khittah*, tidak berarti bahwa orang-orang NU yang berada di dalam PPP di Sulawesi Selatan harus meninggalkan PPP, tetap berada di PPP karena secara organisasi mereka tetap menjadi kader NU, dengan mereka tidak terikat lagi dengan salah satu partai politik dan tidak hanya terpusat di PPP, karena kader NU sudah sangat banyak yang telah tersebar dalam perpolitikan di Sulawesi Selatan dengan bergabung diantara salah satu partai politik pada saat itu .

Para kader Nahdlatul Ulama (NU) tetap memegang teguh akidah *Aswaja* dimanapun mereka berada, dan akidah tersebut juga menjadi salah satu kunci persatuan para kader NU hingga saat ini. *Khittah* pada tahun 1984 terhadap NU ini juga dikatakan sebagai aturan bagi para kader NU, mereka dilarang melakukan

³⁹ *Ibid.* Hlm. 51.

rangkap jabatan ketika mereka sudah menjadi pengurus dalam PPP sehingga tidak boleh mengambil jabatan dalam kepengurusan semisalnya dalam organisasi NU di Sulawesi Selatan. Maka dapat dikatakan faktor tersebut menjadikan masih adanya orang-orang NU secara individu yang masih berpolitik di Sulawesi Selatan, meskipun secara organisasi NU bukan lagi partai politik dan terpilih menjadi anggota parlemen di Sulawesi Selatan.⁴⁰ Menurut Syahril Langko bahwa setelah NU keluar dari organisasi politik khususnya di PPP di Sulawesi Selatan, maka orang NU yang masih berada di PPP tidak lagi menyebutkan bahwa dia secara ibadah merupakan orang NU atau bukan, tetapi mereka diketahui dari latar belakang mereka secara pribadi.⁴¹

Tarikan politik pragmatis juga menjadikan Nahdlatul Ulama (NU) dalam perkembangannya di Sulawesi Selatan, dinilai gagal mengembalikan organisasi tersebut ke *khittah* awal yakni sebagai organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan dan bukan organisasi sosial keagamaan dan politik. Implikasinya terlihat jelas dalam aktifitas NU yang ada di daerah-daerah, dimana NU kehilangan agenda kerja untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Menurut Drs. H. Arasy merupakan pengurus NU cabang Wajo, NU belum mampu melepaskan diri dari perangkat politik yang telah lama menjebak NU sejak awal masuknya di Sulawesi Selatan.

Terjebaknya Nahdlatul Ulama (NU) dalam politik tersebut berlangsung sejak lama hingga pada masa Orde Baru. Perangkat politik yang mengendalikan

⁴⁰ Wawancara, Mansur Paleway. 17 Juli 2023.

⁴¹ Wawancara Syahril Langko, 22 Mei 2023

NU memperlihatkan dirinya dalam orientasi politik, dari setiap aktifitas organisasinya yang selalu berhubungan dengan kepentingan politik tertentu, karena setiap moment-moment Pilkada, baik pelaksanaan khaul terhadap seseorang sesepuh NU digunakan untuk konsolidasi bagi warga NU sebagai pemilih dan tidak dimaksudkan untuk pengembangan tradisi keagamaan versi *Aswaja*.

Orientasi politik dalam aktifitas Nahdlatul Ulama (NU) menandakan model berpikir dalam mengurus organisasi NU adalah mainstream politik dan bukan mainstream organisasi sosial keagamaan. Adanya sebagian oknum pengurus partai politik dalam kepengurusan NU. Hal ini menunjukkan luasnya jaringan NU, tetapi juga menunjukkan kelemahan NU diposisikan sebagai pendukung politik atau tempat suara partai yang bersangkutan dan tidak diposisikan sebagai mitra kerja yang sejajar.⁴²

⁴² Abd Kadir Ahmad, dkk. *Op. Cit.* Hlm. 48.